

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang no. 32 tahun 2004. Otonomi daerah pada prinsipnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang pelayanan umum/publik, otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan aparat pemerintah daerah dengan publik sehingga memberi kualitas pelayanan yang prima.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota memerlukan sarana dan prasarana, yakni kantor yang representatif. Bangunan kantor yang dapat menciptakan sistem/mekanisme kinerja pemerintah yang lebih terkoordinasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efisien efektif, transparan, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Kantor Pemerintah Kota merupakan wadah aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tempat para wakil rakyat mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan di segala sektor kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pemerintah Kota membutuhkan tuntutan khusus yakni, wadah yang berperan sebagai simbol filosofis, fungsional, dan teknis, serta fungsi keterbukaan sebagai simbol wakil dari masyarakat suatu daerah.

Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang semakin pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka meningkat pula tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang profesional, efisien, efektif, transparan, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, maka Kota Semarang telah membentuk dinas-dinas daerah, lembaga daerah dan perusda. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Semarang berupaya memusatkan semua instansi tersebut di lingkungan Balaikota.

Letak instansi-instansi yang ada saat ini menyebar di seluruh Kota Semarang menyebabkan kurang terpadunya kinerja antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. Peletakan kantor instansi-instansi belum sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sehingga menimbulkan kinerja antar instansi kurang maksimal.

Secara fisik penataan massa bangunan kurang menunjang kegiatan di dalamnya, integritas antar bangunan yang satu dengan yang lain kurang menyatu. Sebagai bangunan pemerintahan, tampilan bangunan di lingkungan Balaikota terkesan kurang transparan kepada masyarakat. Penataan ruang luar yang tidak diperhitungkan dan direncanakan membuat penataan parkir menjadi tidak teratur dan tidak memenuhi kapasitas.

Berdasarkan uraian di atas, dibutuhkan kantor pemerintahan yang untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja antar instansi berkonsep bangunan terintegrasi dalam satu wilayah serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan perancangan Relokasi Kompleks Kantor Pemerintahan Kota Semarang yang representatif dan sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang menjelaskan bahwa adanya pengembangan perkantoran dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1. Tujuan**

Merencanakan Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang yang representatif dan dapat berfungsi sebagai bagian dari pemerintahan yang terkoordinasi dalam satu kompleks pusat pemerintahan Kota Semarang

### **1.2.2. Sasaran**

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses perencanaan dan perancangan Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang berdasarkan aspek - aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect), sehingga diperoleh kajian berupa program ruang dan konsep dasar perancangan.

### **1.3. Manfaat**

#### **1.3.1. Subjektif**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke dalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir.

#### **1.3.2. Objektif**

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.

### **1.4. Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembahasan dititikberatkan pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur, antara lain :

- Aspek fungsional yang menekankan pada kebutuhan ruang dan fasilitas yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang dengan pembinaan yang terarah dan berkesinambungan
- Fungsi bangunan kantor dinas teknis pemerintah kota sebagai fasilitas pemerintahan dan instansi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan teknis infrastruktur
- Lokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang dengan perencanaan bangunan yang disesuaikan dengan arahan kebijakan perencanaan pemerintah Kota Semarang

Hal-hal lain yang relevan dan mendasari faktor-faktor perencanaan dan perancangan menjadi bahan pertimbangan tanpa pembahasan secara mendalam. Perencanaan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang direncanakan pada kawasan pengembangan kompleks pemerintahan Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

## **1.5. Metode Pembahasan**

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain :

### **1.5.1. Metode deskriptif**

Dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, studi banding, data dari instansi terkait, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan operasional suatu kantor dinas teknis pemerintahan kota, observasi lapangan serta browsing internet.

### **1.5.2. Metode dokumentatif**

Dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dan foto-foto observasi lapangan pada Lingkungan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota.

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang.

## **1.6. Sistematika Pembahasan**

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, metode penulisan dan sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A).

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Berisi uraian literatur tentang tinjauan umum kantor pemerintah daerah, tinjauan bangunan kantor, tinjauan studi kasus Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang dan studi banding di Kantor Dinas Teknis

Pemerintah Kota Surakarta dan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Serang Banten.

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS**

Berisi uraian tinjauan kota Semarang berupa data – data fisik dan nonfisik berupa, seperti kondisi geografi, topografi, demografi, rencana pembagian wilayah Kota Semarang, serta kebijakan tata ruang wilayah di Kota Semarang dan tinjauan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang baik secara fisik maupun non fisik.

### **BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN**

Berisi tentang kesimpulan pembahasan, batasan permasalahan dan anggapan anggapan yang diperlukan dalam menyusun program perencanaan dan perancangan Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang.

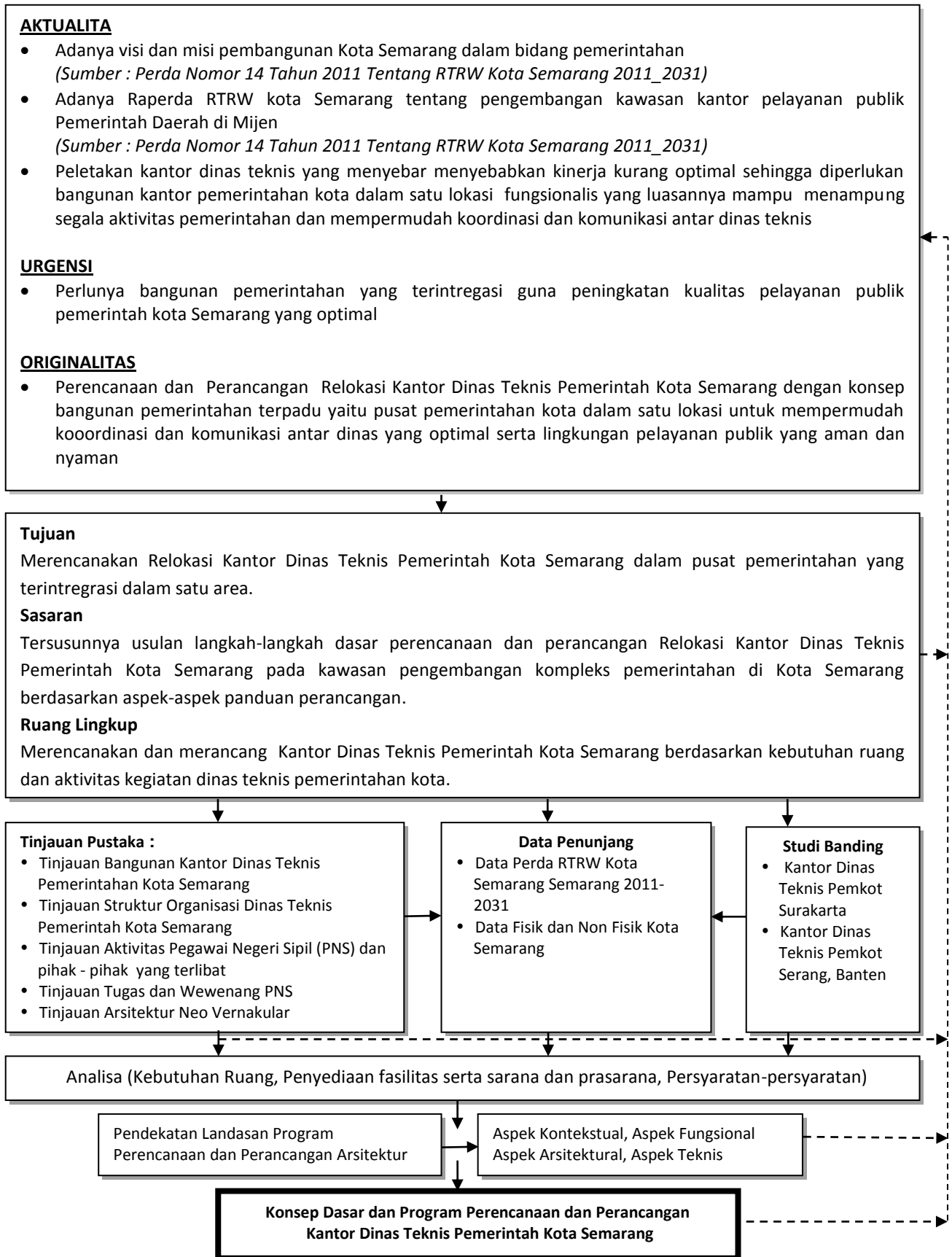
### **BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN ARSITEKTUR**

Berisi tentang kajian dan analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan pendekatan aspek arsitektural, aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek kontekstual.

### **BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR**

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang.

1.7. Alur Pikir



Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir  
Sumber: Pemikiran penulis, 2013